

GEDUNG DPR

Kinerja Rendah, Gedung Tinggi

Sejak muncul ke publik, rencana pembangunan gedung baru DPR tak henti menuai kecaman publik. Terakhir, Ketua DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan Sekjen DPR disomasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN Kesejahteraan yang menuntut penghentian rencana pembangunan itu dan meminta maaf kepada rakyat dalam waktu 7 x 24 jam.

Kepada *Kompas*, Ketua DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR 2009-2014 Marzuki

Alie mengaku, secara pribadi pembangunan gedung tidak usah diteruskan. "Saya sudah sampaikan melalui Twitter, lebih baik dibatalkan," tandas Marzuki di ruang kerjanya, Senin (4/4) sore. "Tetapi, ini keputusan paripurna, jadi harus diputuskan melalui paripurna. Saya ini hanya juru bicara, bisa apa?"

Menurut Marzuki, rencana pembangunan gedung DPR 36 lantai hasil kerja BURT DPR 2009-2014 setelah menganalisis kinerja DPR dan dituangkan dalam *Rencana Strategis DPR RI 2010-2014*. Pembangunan gedung adalah bagian dari meningkatkan kinerja anggota DPR. "Yang terpenting dari renstra adalah reformasi kesekjenan DPR. Pekerjaan besar dan luas, pengawasan lemah," kata Marzuki.

Gedung baru menjadi kebutuhan karena DPR dengan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi, sangat kekurangan sistem pendukung. "Tak imbang kemampuan anggota DPR dengan legislatif. Karena itu, perlu tambahan staf ahli, dari dua menjadi lima orang, ditambah pusat kajian. Ruang yang ada tak mencukupi," tutur Marzuki.

Kepercayaan masyarakat kepada DPR memang sangat rendah. Dari survei terakhir *Kompas* (4/4), 69 persen responden memiliki citra buruk terhadap kinerja DPR. Secara obyektif, dari 70 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional 2010, DPR hanya berhasil mengesahkan 8 undang-undang. Anggota DPR juga terlihat lebih banyak riuh di berbagai rapat. Undang-undang yang dihasilkan pun tak selalu memuaskan, misalnya UU Pornografi yang implementasinya menimbulkan persoalan, seperti pada kasus Ariel "Peterpan".

Rencana pembangunan gedung DPR memang penuh kontroversi. Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR 2004-2009 merekomendasi perbaikan sistem kerja, peningkatan sumber daya manusia, penyempurnaan peraturan perundangan, dan perbaikan sarana pendukung DPR.

Menurut anggota DPR yang juga Wakil Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR 2004-2009, Eva Sundari, menjawab kebutuhan perbaikan sarana pendukung, tim merekomendasi pembuatan *grand design* penataan ulang dan pemanfaatan maksimal fasilitas di areal DPR seluas 72,8 hektar. Tim lalu mengadakan *workshop* penyusunan lomba desain kompleks DPR, mengundang Ikatan Arsitek Indonesia dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

"Saat sedang *workshop*, tiba-tiba ada wakil sebuah BUMN datang membawa maket gedung dan ingin presentasi. Kami tolak karena kami bukan ingin bangun gedung dan sedang mempersiapkan lomba. Kok, disodor-sodori desain dan maket jadi," papar Eva.

Tanpa audit

Eva menyebut, tampaknya BUMN konstruksi PT Yodya Karya yang desainnya kini jadi acuan mendapat masukan dari Sekretariat Jenderal DPR. "Entah kenapa, lomba akhirnya tak pernah dilangsungkan. Kami juga belum pernah melakukan audit ruangan untuk tahu kondisi sebenarnya dan berapa dibutuhkan," tutur Eva.

Meski begitu, muncul usulan DPR 2004-2009 untuk membangun gedung 27 lantai dengan desain yang sekarang beredar. Marzuki Alie mengatakan, keputusan BURT DPR 2009-2014 tentang kebutuhan gedung baru tak ada hubungan dengan keputusan DPR sebelumnya walau desainnya tetap memakai desain lama.

"Kami tambah jadi 36 lantai. Hitungannya, tiap anggota butuh lima tenaga ahli dan satu asisten pribadi. Kami juga membayangkan jumlah anggota Dewan bertambah sejalan meningkatnya jumlah penduduk," kata Marzuki. Sementara gedung lama 23 lantai tetap akan digunakan, sebagian untuk Setjen DPR dan tempat pertemuan. Gedung Setjen yang sekarang

akan digunakan Setjen DPD.

Marzuki menjelaskan, sekitar Agustus-September 2010, Sekjen DPR membawa desain lama dan meminta tanda tangan persetujuan proses pembangunan gedung baru. Dia mengaku menolak karena ingin sosialisasi dulu.

Penasihat Fraksi Gerindra di DPR, Martin Hutabarat, tersinggung dengan pandangan kinerja anggota DPR akan meningkat bila disediakan ruang lebih besar dan nyaman. Yang menyakitkan, lanjut Martin, sangat kuat kesan pembangunan gedung ini adalah "proyek".

"Persoalannya bukan biaya per meter persegi, tetapi apakah dibutuhkan? Apa harus sebesar itu gedung dan biayanya? Apa desain seperti itu yang diinginkan? Seharusnya desainnya disayembarakan, memasukkan unsur Bhinneka Tunggal Ika dan ramah lingkungan supaya jadi contoh daerah," tandas Martin.

Kontroversi

Biaya pembangunanlah yang paling kontroversial. Saat pertama diajukan, biaya adalah Rp 1,8 triliun. Bahkan, ada usulan dari konsultan desain meng-

gunakan kolam penampungan air untuk pemadaman kebakaran menjadi kolam renang berikut spa. Dalam perjalanan waktu, biaya terus turun, kini jadi Rp 1,138 triliun.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menolak berkomentar saat dihubungi *Kompas*. Dia menunjuk Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat.

Sumirat mengatakan, biaya pembangunan gedung Rp 7,2 juta per meter persegi dan luas lantai 157.000 meter persegi. Dia menolak pendapat, biaya gedung cukup Rp 800 juta tiap ruangan anggota Dewan seluas 111 meter persegi karena gedung akan diisi juga dengan fasilitas penunjang, seperti ruang pusat-pusat studi hukum dan kebijakan.

Biaya pembangunan gedung DPR oleh Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dengan standar DKI Jakarta, Rp 3,5 juta per meter persegi, dikalikan 36 lantai. "Indeks pengalannya sampai tingkat 36 atau setara 1,73 kalinya. Padahal, indeks dalam peraturan Menteri PU adalah untuk gedung 8 lantai, sedang gedung DPR 36

Biaya terdiri atas fisik gedung Rp 1,138 triliun untuk 157.000 meter persegi. Biaya konsultan perencana Rp 19,2 miliar, sudah dibayar Rp 9,6 miliar pada 2008-2010, rencananya kekurangan dibayar pada 2011-2013.

Biaya manajemen konstruksi Rp 16,87 miliar, dibayar Rp 864,14 juta pada 2008-2010, kekurangannya dibayar 2011-2013. Komponen pengelolaan kegiatan selama 2011-2013 mencapai Rp 960 juta, untuk membayar kepanitiaan, pengumuman, dan rapat-rapat. "Total Rp 1,164 triliun," kata Sumirat.

Meski rencana pembangunan menuai protes masyarakat, prakualifikasi peserta tender sudah dilakukan Setjen DPR. Delapan peserta mengajukan dokumen tender, tetapi pengumuman peserta tender babak akhir ditunda Selasa lalu. Kini, kelanjutannya menunggu hasil Rapat Paripurna DPR.

Ubah audit

Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah juga merencanakan pembangunan gedung kantor bagi anggota DPD di tiap ibu kota provinsi. Rencana awal, ge-

Rp 30 miliar-Rp 40 miliar.

"Pembangunan mulai dilakukan, diam-diam, karena belum ada persetujuan politik dari Sidang Paripurna DPR. Apa iya biayanya harus semahal itu keluh Ketua Panitia Akuntabilitas DPR yang juga anggota DPD dari Nusantara Tenggara Barat, Farouk Muhammad kepada *Kompas* akhir pekan lalu. (Bac juga halaman 34)

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri, di kantornya, Jumat (1/4), mengakui, sudah waktunya BP mengubah cara kerja bersifat pasca audit.

"Melihat perkembangan terakhir harus diaudit juga apakah pembangunan tersebut diperlukan, mampukah daerah memelihara dan memanfaatkan dengan nilai tambah. Ini demi efektivitas pembangunan dan efisiensi uang negara," kata Hasan Bisri.

Karena kelahirannya melawan koruptasi menjaga akuntabilitas, pembangunan gedung baru DPR akan tentu menuai kecaman. Kecuali proses dimulai lagi dari awal, diawali audit ruangan, dan semua proses transparan.